

PENERAPAN GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI PERDA PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA DENPASAR

(Studi Kasus Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas)

Ni Putu Evilia Octaviani, Tedi Erviantono, Putu Eka Purnamaningsih

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: eviliaoctaviani@rocketmail.com,

tiedierviantono@unud.ac.id, ekapurnamaningsih@unud.ac.id

ABSTRACT

In the area of Bali, regulation that related to persons with disabilities is a new thing created by the executive and legislature, then ratified in 2015. The passing of a regulation can not be separated from the implementation of the regulation because the success of regulation is determined by the implementation being done to realize these policies. Given that implementation becomes very important, therefore it will be very important as well for each element associated with regulation to implement the regulation together that provide benefits for persons with disabilities. In this study, the authors use descriptive qualitative research method, which make the process of data collection by observation and interview techniques as well as linking with the existing theory. The theory used is the theory of governance by focusing on the concept of participation, justice, and implementation. The theory and the concept would be attributed to Regulation No. 9 of 2015 on the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities, which assessed the participation of the various elements of government, private and community, considering the issues related to persons with disabilities is a cross cutting issue that not only addressed by one side but the various side concerned. So it is with justice that earned by persons with disabilities by the existence of regulation. It will demonstrate the implementation of disabilities Regulation by applying the principles of governance.

Keywords: *governance, implementation, Regulation No. 9 of 2015, persons with disabilities*

PENDAHULUAN

Persoalan disabilitas menjadi agenda penting dalam pemenuhan hak-hak kemanusiaan. Keterbatasan peran pada kelompok penyandang disabilitas kerap kali menjadi penghambat untuk berpartisipasi dalam setiap aktivitas publik. Seiring dengan perkembangan zaman, hak-hak bagi kalangan disabilitas mulai dipertimbangkan dalam melakukan perumusan kebijakan publik, baik pada ranah Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

World Health Organization (WHO) mengestimasi jumlah dari kalangan disabilitas yang ada di kebanyakan negara berkembang adalah 10-15% dari total penduduk keseluruhan. Di Indonesia juga telah diatur secara yuridis jaminan hak bagi kalangan disabilitas, yang mana telah dilindungi berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 1997

tentang Penyandang Cacat dan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)* dengan lahirnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Indonesia mengakomodasi undang-undang yang telah disahkan dengan ikut meratifikasi CRPD, karena memiliki komitmen dan juga menunjukkan kesungguhannya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak yang seharusnya didapatkan oleh penyandang disabilitas, dengan harapan agar hak-hak mereka dapat terpenuhi dan memberikan kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas itu sendiri. Adanya kebijakan yang mengatur, peraturan ataupun undang-undang merupakan suatu elemen penting dalam memberikan jaminan bagi warga negara.

Keluarnya suatu ketetapan kebijakan yang ditujukan bagi penyandang disabilitas, belum mampu secara maksimal menangani keluhan-keluhan yang dialami oleh penyandang disabilitas yang sifatnya begitu kompleks. Sehingga perlu adanya suatu peraturan yang diimplementasikan oleh setiap daerah untuk mendukung undang-undang yang berlaku.

Isu-isu terkait permasalahan yang dialami oleh kalangan disabilitas menunjukkan pentingnya kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap hak kalangan disabilitas. Sehingga kebijakan yang dibuat harus berdasarkan pada keadaan konkret masyarakat. Fokus yang melatarbelakangi kebijakan terhadap kalangan disabilitas tidak hanya terkait ada atau tidaknya produk hukum yang melindungi mereka, namun juga implementasi dari produk hukum tersebut yang seharusnya dapat menjangkau semua sasaran yang terkena dampak dari suatu kebijakan.

Di Bali, khususnya di Kota Denpasar, jumlah penyandang disabilitas tahun 2014 sebanyak 4.031 orang (Bali Dalam Angka, 2015). Berkenaan dengan hal tersebut, Provinsi Bali telah mengesahkan suatu Perda terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perda terkait penyandang disabilitas tersebut, sudah mulai diimplementasikan oleh Pemerintah bersama dengan instansi-instansi non-pemerintah yang terkait dengan Perda penyandang disabilitas.

Perda terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sangat menarik untuk dikaji dengan melihat bagaimana implementasi Perda disabilitas dan komitmen dari Pemerintah serta kerjasama dari berbagai *stakeholders* untuk mewujudkan masyarakat penyandang disabilitas yang berkeadilan. Mengingat bahwa pengimplementasian suatu Perda tidak hanya diimplementasikan oleh satu pihak, namun berbagai pihak yang juga memiliki keterkaitan dengan penyandang disabilitas.

KAJIAN PUSTAKA

Governance

Penelitian ini menggunakan teori *Governance*. Istilah *Governance* menggambarkan sejumlah himpunan organisasi atau institusi, baik pemerintah

ataupun swasta, yang secara bersama melakukan urusan pemerintahan. *Governance* tidak lagi semata-mata menunjuk pada kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah namun menekankan pada fungsi *governing*, yang mana dilakukan oleh berbagai pihak diantaranya pemerintah, swasta dan masyarakat.

Mekanisme terkait tata pemerintahan yang baik, diartikulasikan melalui partisipasi masyarakat secara efektif dalam kegiatan-kegiatan publik. *United Nations Development Programme* (UNDP) menjelaskan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*”. Perwujudan dari tata pemerintahan yang baik dapat dilakukan oleh semua tingkatan, dimana tidak hanya pemerintah yang melakukan pekerjaan namun juga rakyat turut ambil bagian dalam mengatur kegiatan-kegiatan sosial dan politik yang ada dalam masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.

United Nations Development Programme (UNDP) menyebutkan ada 9 karakteristik utama dalam mewujudkan *governance* (Dwiyanto, 2003:5), diantaranya: (1) partisipasi, (2) kepastian hukum, (3) transparansi, (4) responsif, (5) konsensus, (6) keadilan, (7) efektif dan efisien, (8) akuntabel, dan (9) visi strategis.

1. Konsep Keadilan

Keadilan merupakan satu hal utama dalam suatu institusi sosial, sebagaimana kebenaran yang dilakukan untuk menciptakan suatu keseragaman dalam kehidupan sosial. Keadilan berarti tidak membiarkan segelintir orang melakukan suatu pengorbanan atas dasar keterpaksaan, yang kemudian keuntungannya dinikmati oleh banyak orang. John Rawls mengemukakan keadilan sebagai suatu pemaksimalan kemerdekaan dan pemberian kesetaraan bagi semua orang, sehingga setiap orang mendapatkan hak yang sama dalam kehidupan sosial.

Masyarakat yang terdiri dari kumpulan individu yang menginginkan adanya persatuan namun memiliki pembawaan dan hak yang berbeda, sehingga untuk mempersatukannya perlu memandang berbagai pihak dalam situasi awal secara netral dan tertutup atas seluruh

fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suatu keadilan sosial dengan tidak mengedepankan sikap egois, iri hati, dan dominasi.

Pada kehidupan bermasyarakat, haruslah tercipta situasi yang sama dan setara bagi setiap orang. Tidak ada pihak yang dibedakan, artinya setiap orang memiliki posisi yang sama, tidak ada yang memiliki posisi lebih tinggi dan tidak ada pula yang memiliki posisi lebih rendah. Keadaan ini menjelaskan bahwa perlu adanya suatu kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

John Rawls mengemukakan ada tiga prinsip keadilan, diantaranya: pertama, prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*), kedua, prinsip perbedaan (*differences principle*), dan ketiga, prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Prinsip kebebasan yang sama harus menjadi prioritas di antara prinsip yang lainnya, dan prinsip persamaan kesempatan harus lebih diutamakan daripada prinsip perbedaan.

2. Konsep Partisipasi

Partisipasi dapat diartikan sebagai suatu keterlibatan mental dan emosi masyarakat untuk ikut serta dalam penyampaian saran atau pendapat dalam merencanakan suatu proses pembangunan dan ikut serta bertanggung jawab sesuai dengan tingkat kewajibannya. Soergada Poerbakawatja (1981) mengartikan partisipasi sebagai suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.

Partisipasi memberikan suatu kesetaraan dan transparansi kepada berbagai pihak yang memiliki kemampuan atau prakarsa untuk berkomunikasi secara terbuka dan kondusif untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Dengan itu, hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan publik harus dapat mencapai sasaran sesuai dengan keputusan dan kesetaraan kewenangan yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya, partisipasi ini akan sangat bergantung pada dedikasi dan komitmen dari masyarakat.

Bastian dalam Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik (2014:63)

menjelaskan bahwa partisipasi publik bertujuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan membangun suatu pemahaman dengan keterlibatan aktif, baik secara individu, kelompok ataupun organisasi. Keberhasilan dari suatu partisipasi publik dapat diukur dengan ketepatan waktu, akuntabilitas, inklusif, metodologi yang tanggap dan sesuai, keberlanjutan dalam proses partisipasi, dan sumber daya yang memadai.

3. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu unsur penting untuk melengkapi proses kebijakan publik, mengingat bahwa tanpa adanya implementasi maka kebijakan yang dibuat tidak akan dapat menghasilkan manfaat. Implementasi biasa dikaitkan dengan suatu kegiatan yang tujuannya untuk mencapai berbagai hal yang diinginkan. Tidak hanya itu, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan juga harus didukung oleh kelengkapan kebijakan termasuk didalamnya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk merealisasikan suatu kebijakan.

Pada saat melakukan suatu implementasi kebijakan, jika tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dan matang maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan dapat diwujudkan dengan maksimal. Implementasi kebijakan dilakukan dengan bersama-sama agar pelaksanaannya pun dapat lebih maksimal.

Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2011:93) menjelaskan ada dua variabel besar yang dapat mendukung keberhasilan daripada proses implementasi diantaranya ialah isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan memiliki pengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi termasuk didalamnya berbagai kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap program yang tersedia, manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu kebijakan, adanya jangkauan perubahan setelah pelaksanaan suatu program yang berasal dari kebijakan, kedudukan dari pengambil keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang disediakan. Begitu pula dengan konteks implementasi atau lingkungan implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan dari kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan,

karakteristik dari lembaga-lembaga yang melakukan kebijakan, dan kepatuhan serta daya tanggap dari pelaksana kebijakan itu sendiri.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dimana penelitian kualitatif deskriptif ini berusaha untuk menggambarkan suatu fenomena sosial dengan menafsirkan tentang situasi yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa data primer yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan data utama yang sifatnya penting serta data sekunder yang dikumpulkan dari pihak lain sebagai data pendukung.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive* dan *snowballsampling*, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu data atau informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Data atau informasi yang diperoleh dilakukan dengan berbagai macam teknik pengumpulan data diantaranya observasi, wawancara, dokumentasi, dan metode kepustakaan. Kemudian, data yang telah diperoleh dianalisis untuk mendapatkan suatu arti dan makna serta penjelasan terhadap data yang diperoleh.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III dalam Indiahono (2009:31) merupakan sebuah proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara matang implementasinya maka tujuan yang dicapai tidak akan terwujud.

Keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan bergantung pada isi kebijakan dan lingkungan implementasinya (Merilee S. Grindle dalam Subarsono, 2011). Perwujudan nyata dari implementasi kebijakan ditunjukkan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program. Pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Denpasar, yang memiliki konsen terhadap penyandang disabilitas mewujudkan suatu program dengan tujuan memberikan kesejahteraan sosial sesuai dengan

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015.

Pemberdayaan, pendayagunaan, dan promosi dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat kedisabilitasannya. Tentunya, program-program yang dikembangkan oleh Pemerintah sesuai dengan kebutuhan dari penyandang disabilitas. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan penyandang disabilitas lebih senang dengan melakukan usaha mandiri.

Implementasi Perda juga harus menghasilkan manfaat berdasarkan program-program yang dilakukan. Setiap program yang ditujukan bagi penyandang disabilitas harus menghasilkan suatu manfaat yang diterima. Seperti halnya, penyediaan aksesibilitas jalan, khususnya trotoar, yang disediakan tidak hanya untuk masyarakat umum namun juga mengakomodasi penyandang disabilitas.

Kota Denpasar melalui Dinas PU Kota Denpasar telah menjalankan program tersebut, yang mana trotoar di Kota Denpasar sudah dilengkapi dengan tegel kuning sebagai penuntun pejalan kaki khususnya bagi tuna netra, dan itu merupakan akses yang diperoleh bagi penyandang disabilitas. Sehingga manfaat yang diterima oleh penyandang disabilitas dapat memberikan perubahan bagi kehidupan dan penghidupan kelompok penyandang disabilitas.

Perubahan yang dicapai haruslah dapat memberikan kesamaan kesempatan dalam segala aspek, juga rehabilitasi untuk pengembangan bagi penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya layaknya orang-orang pada umumnya, dan aksesibilitas yakni dengan memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama, khususnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan publik.

Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tidak hanya menilik pada kinerja dari Dinas Sosial namun adanya kerjasama dari berbagai sektor, mengingat permasalahan yang terkait dengan keberadaan penyandang disabilitas tidak hanya dapat ditangani oleh Dinas Sosial semata. Maka dari itu, penting adanya kerjasama dari berbagai sektor untuk memaksimalkan pelaksanaan Perda terkait penyandang disabilitas. Karena pelaksanaan Perda tidak

akan berjalan dengan maksimal ketika sumber daya yang diperlukan belum tersedia.

Tidak hanya terkait sumber daya manusia namun juga sumber pendanaan. Dana menjadi penting untuk mewujudkan program yang telah direncanakan agar dapat terealisasi dengan maksimal.

Mewujudkan suatu keberhasilan implementasi dari Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 adalah penting adanya kerjasama sehingga tidak hanya pemerintah yang bekerja sendiri namun juga bersama dengan institusi-institusi lain yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dan masyarakat. Hal tersebut bukan berarti Pemerintah tidak lagi berperan dalam implementasi Perda namun Pemerintah tidak lagi mendominasi dalam pelaksanaan Perda, melainkan ada partisipasi dari berbagai pihak.

Sasaran dari Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 adalah penyandang disabilitas, sehingga perlu adanya kepuasan yang diterima oleh penyandang disabilitas sebagai kelompok sasaran. Pada kenyataannya, penyandang disabilitas masih sering mendapatkan tindakan diskriminatif, yang mana diskriminasi tersebut justru datang dari masyarakat yang sering dijumpai. Tindakan yang masih menganggap penyandang disabilitas sebagai kelompok minoritas menjadikan penyandang disabilitas pesimis terhadap keberadaan Perda itu sendiri.

Partisipasi dari pemerintah bersama dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas dalam melakukan suatu program sudah berjalan dengan baik, namun ketika tidak ada dukungan dari masyarakat maka Perda tidak akan dapat diimplementasikan dengan maksimal.

Keadilan yang diberikan bagi penyandang disabilitas, utamanya untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas itu sendiri, sehingga mereka mampu berinteraksi dengan lingkungan disekitarnya. Hal tersebut sudah berusaha untuk diwujudkan oleh Pemerintah bersama dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas namun penyandang disabilitas tidak akan merasakan keadilan tanpa adanya pengakuan dari masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dianalisis bahwa implementasi Perda Provinsi Bali Nomor 9

Tahun 2015 terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas khususnya di Kota Denpasar telah menerapkan tata pemerintahan yang baik, hanya saja masih perlu dibangun sebuah dialog antar *stakeholders* agar semua pihak merasa memiliki Perda tersebut.

Dengan itu, perlu adanya partisipasi dan kerjasama dari seluruh komponen masyarakat untuk mengimplementasikan Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015. Tiga domain penting dalam *governance* meliputi pemerintahan, swasta, dan masyarakat, yang harus bekerjasama mewujudkan pembangunan manusia yang sifatnya berkelanjutan, tidak tergantung pada berfungsinya pemerintahan atau swasta namun interaksi dari masyarakat yang mampu memfasilitasi interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada penelitian ini menekankan pada dua karakteristik *governance* diantaranya partisipasi dan keadilan. Kedua karakteristik ini sudah membuktikan bahwa implementasi dari Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 telah mencakup partisipasi dan keadilan baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat, hanya saja masih perlu ditegaskan kembali kepada semua komponen masyarakat agar semua pihak merasa memiliki Perda tersebut.

Partisipasi dan keadilan juga merupakan cerminan dari kehidupan bersama dan adanya rasa saling percaya yang dibangun antara pemerintah, swasta dan masyarakat, karena perhatian dan dukungan yang lebih besar dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015.

KESIMPULAN

Kota Denpasar merupakan salah satu daerah yang ikut melaksanakan Peraturan Daerah terkait dengan penyandang disabilitas yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015. Secara umum, pelaksanaan Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 telah berjalan dengan baik, namun masih perlu adanya maksimalisasi dari penegasan Perda disabilitas terhadap masyarakat umum agar Perda ini dapat menjamin pengakuan dari

masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Partisipasi yang dilakukan dalam mengimplementasikan Perda oleh Pemerintah, organisasi penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas sudah dapat berjalan dengan baik. Setiap program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kota Denpasar ataupun organisasi penyandang disabilitas dapat dilaksanakan dengan baik yang ditunjukkan oleh antusiasme dari penyandang disabilitas itu sendiri dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pemberdayaan, pendayagunaan, dan promosi juga dilaksanakan untuk memberikan keadilan bagi penyandang disabilitas agar mereka mampu berinteraksi dengan lingkungan disekitarnya atas kemampuan yang mereka miliki. Tidak hanya itu, penyediaan fasilitas umum, seperti trotoar, juga telah mengakomodasi penyandang disabilitas.

Disisi lain, pengakuan masyarakat masih terbatas mengenai penyandang disabilitas. Fasilitas yang disediakan bagi pejalan kaki seperti trotoar dengan tegel kuning sebagai akses, yang juga mengakomodasi penyandang disabilitas, masih disalahgunakan oleh kebanyakan masyarakat untuk parkir kendaraan bermotor maupun tempat berjualan pedagang kaki lima. Sehingga perlu adanya penegasan terkait sosialisasi Perda agar semua pihak merasa memiliki Perda tersebut.

SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015, maka beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Perda sudah dilakukan dengan baik namun hendaknya lebih mempertegas pada pengakuan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan Perda ini rawan dengan tindakan diskriminasi agar tidak hanya Pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas yang melaksanakan namun dukungan dari masyarakat umum juga diperlukan. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi terkait Perda tidak hanya kepada dinas-dinas terkait

Perda dan penyandang disabilitas saja namun juga seluruh masyarakat. Walaupun Pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas telah memaksimalkan pelaksanaan Perda, tanpa perhatian dari masyarakat maka Perda ini tidak akan berjalan dengan maksimal.

2. Untuk masyarakat Kota Denpasar agar lebih peduli terhadap permasalahan daerah dan turut serta aktif dalam pelaksanaan Perda. Pemerintah juga bertanggungjawab dalam membangkitkan kesadaran masyarakat dalam setiap proses implementasi Perda yang dilakukan.
3. Perlunya penegasan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki lebih dari 100 pegawai, yang mana sesuai dengan isi dari Perda, bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk mempekerjakan minimal 1 orang penyandang disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan pekerjaan di ranah publik.
4. Adanya perhatian untuk Kelompok Usaha Bersama yang dibentuk oleh penyandang disabilitas yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Salah satunya ialah terkait pendanaan yang harus didukung untuk mengembangkan kelompok usaha bersama yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Bastian, Indra. 2014. *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Jakarta: Ghalia Indonesia

- Budiardjo, Miriam. 2009. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dwiyanto, Agus dkk. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Dwiyanto, Agus. 2014. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Moleong, Lexy. J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rawls, John. 2011. *A Theory Of Justice: Teori Keadilan* diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soegarda Poerbakawatja, dkk. 1981. *Ensiklopedia Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Thoha, Miftah. 2000. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo
- Tilaar, H.A.R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan. Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nyalunga, Dumisani. 2006. *Journal of An Enabling Environment for Public Participation in Local Government*. (Online) Tersedia: <http://www.academicjournals.org/INGOJ> (diakses pada 23 Oktober 2015)
- Badamasiuy dan Bello. 2013. *Journal of An Appraisal of Administrative Justice and Good Governance in Nigeria*. (Online) Tersedia: <http://dx.doi.org/10.5539/jpl.v6n2p216> (diakses pada 23 Oktober 2015)
- Larson, David Allen. 2014. *Journal of Access to Justice for Persons with Disabilities: An Emerging Strategy*. (Online) Tersedia: www.mdpi.com/journal/laws (diakses pada 23 Oktober 2015)
- Mohammadi, Norazizan dan Shahvandi. 2011. *Journal of Civic Engagement, Citizen Participation and Quality of Governance in Iran*. (Online) Tersedia: www.krepublishers.com (diakses pada 23 Oktober 2015)
- Ro'fah, Andayani dan Supartini. 2012. *Jurnal Kebijakan Berbasis Hak: Pengalaman Pemerintah DIY dalam Penyusunan Perda Penyandang Disabilitas*. (Online) Tersedia: www.digilib.uin-suka.ac.id (diakses pada 23 Oktober 2015)
- Harahap dan Bustanuddin. 2015. *Jurnal Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas menurut Convention On The Rights Of*

Persons With Disabilities (CRPD).
(Online) Tersedia: www.online-journal.unja.ac.id (diakses pada 23 Oktober 2015)

Sumber Website/Internet

www.sp.beritasatu.com (di akses pada 4 November 2015)

www.satuharapan.com (di akses pada 4 November 2015)

www.m.tempo.co (di akses pada 4 November 2015)

www.m.metrotvnews.com (di akses pada 4 November 2015)

Sumber Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pengesahan Konvensi
Hak-hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perlindungan
dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
tentang Pembentukan Kota
Denpasar

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4
Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Denpasar